

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu proses, maka pembangunan ekonomi mempunyai kaitan dan pengaruh antara faktor-faktor di dalamnya yang dapat menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut. Selanjutnya pembangunan ekonomi akan tercermin pada kenaikan pendapatan perkapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu keberhasilan usaha negara tersebut untuk mendistribusikan pendapatan secara merata dan adil serta dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di negara tersebut. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indeks ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan. Menurut *Todaro* (2016) tujuan utama pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan setinggi-tingginya, seharusnya pembangunan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kesenjangan pembangunan secara umum selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek. Bukan saja berupa kesenjangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan perkapita, tetapi juga kesenjangan dalam proses distribusinya. Bukan pula semata-mata berupa kesenjangan antar daerah, akan tetapi juga berupa kesenjangan ekonomi dalam lapisan masyarakat yang ada. Dari segi normatif, upaya untuk mengurangi kesenjangan merupakan salah satu tujuan

pembangunan yang harus dicapai, terlebih bagi pemerintah yang saat ini perannya semakin strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal selain karena adanya penguatan peran pemerintah daerah sebagai konsekuensi logis dari penerapan otonomi yang tengah berlangsung saat ini.

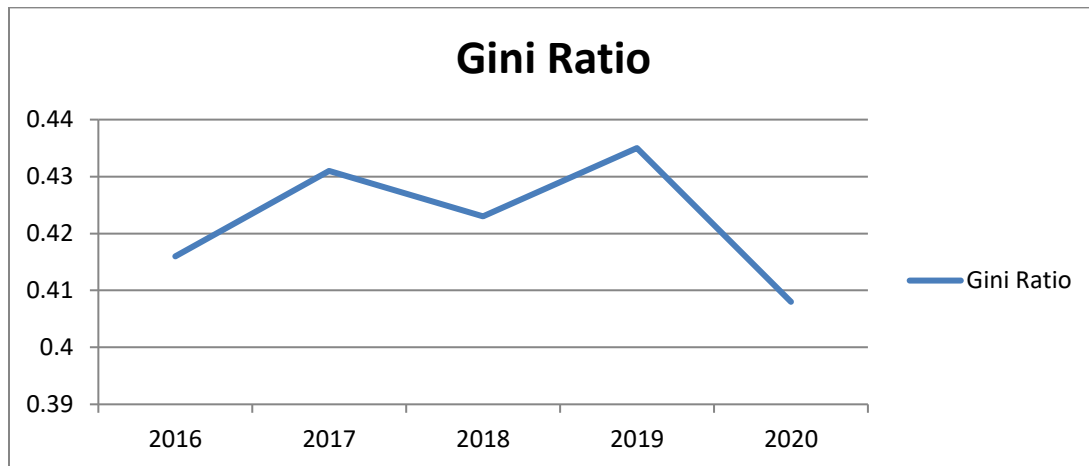
Selain pertumbuhan ekonomi, tolak ukur keberhasilan pembangunan juga dilihat dari struktur ekonomi dan kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan juga antar sektor. Distribusi yang tidak merata menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan cenderung bertambah besar selama tahap-tahap awal pembangunan, baru kemudian selama tahap-tahap lebih lanjut dari pembangunan berbalik menjadi lebih kecil. Dengan kata lain bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan masih merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam skala yang lebih kecil, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota. Masalah ketimpangan pendapatan, atau lebih populer disebut kesenjangan, baik antar individu, antar kelompok, antar sektor maupun antar daerah perlu mendapat penanganan segera karena akan berdampak negatif baik terhadap stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi. Peran besar pemerintah dalam pengalokasian dana pembangunan untuk

pelayanan publik, diantaranya bagi sektor pendidikan dan kesehatan, telah memungkinkan berkurangnya masalah kemiskinan yang merupakan salah satu "cacat" dalam keberhasilan pembangunan ekonomi selama ini (Priyono Tjiptoherijanto, 2014).

Menurut Tambunan (2011), Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami masalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan terjadi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Todaro (2013), Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Lebih lanjut Todaro & Smith (2016) mengemukakan bahwa Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menimbulkan berbagai dampak antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta dianggap tidak adil. Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari angka gini Rasio, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami ketidakstabilan (naik turun).

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan pendapatan orang kaya dan orang miskin. Bila kondisi seperti ini yang terjadi di suatu daerah, berarti pembangunan yang dilaksanakan lebih berpihak kepada segelintir orang kaya, sedangkan orang miskin tidak menikmatinya.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

**Gambar 1.1 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Indonesia 2016- 2020**

Faktor yang diduga meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2013), peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan Ketimpangan Pendapatan dan sebaliknya. Perkembangan ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan gini rasio dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (berdasarkan teori dari Todaro, Barro dan Ebel & Yilmaz) yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja dan investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per pulau di Indonesia dari tahun 2008-2012. Menurut Todaro (2013), peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya begitupula terjadi di Pulau Sulawesi.

**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk**

Provinsi	2000-2010	2010-2020
Sulawesi Utara	1,28	1,15
Sulawesi Tengah	1,95	1,69
Sulawesi Selatan	1,17	1,12
Sulawesi Tenggara	2,08	2,18
Gorontalo	2,26	1,64
Sulawesi Barat	2,68	1,94

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa jumlah penduduk ke enam provinsi se Sulawesi dari ke dua tahun dasar 2000 dan 2010 bergerak fluktuatif namun cenderung baik dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.

Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah gini rasio (koefisien gini), dimana gini rasio dapat menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Alat ukur atau media yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien gini (*gini rasio*) dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia (*World Bank*). Pada tabel. 1.2. berikut terlihat pola distribusi

pendapatan dan koefisien gini untuk beberapa tahun terakhir di Sulawesi ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Gini Ratio Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019**

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	0,370	0,366	0,421	0,404	0,431	0,364
2011	0,358	0,388	0,389	0,427	0,400	0,371
2012	0,430	0,387	0,403	0,418	0,413	0,335
2013	0,446	0,391	0,391	0,432	0,445	0,324
2014	0,436	0,352	0,399	0,448	0,453	0,378
2015	0,366	0,370	0,381	0,404	0,401	0,362
2016	0,379	0,347	0,388	0,400	0,410	0,371
2017	0,394	0,345	0,404	0,429	0,405	0,339
2018	0,372	0,317	0,392	0,388	0,417	0,366
2019	0,376	0,330	0,393	0,391	0,410	0,365

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019*

Berdasarkan Tabel. 1.2. maka dapat diketahui sepuluh tahun terakhir indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Sulawesi yaitu indeks gini. Ketimpangan pendapatan di Sulawesi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 mengalami ketidakstabilan (naik turun) atau fluktuatif. Dapat dilihat bahwa ketimpangan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi, mengingat angka indeks gini yaitu 0 sampai 1 yang mana 0 menunjukkan pemerataan dan 1 menunjukkan ketimpangan. Indeks gini se Sulawesi menunjukkan angka yang tinggi selain itu, ketimpangan terbesar di Pulau Sulawesi berada di Provinsi Gorontalo.

Selain pertumbuhan ekonomi yang cepat dan melihat perubahan penduduk dan struktur ekonomi, ketimpangan juga dapat terjadi akibat perbedaan kondisi Struktur ekonomi yang besar antar wilayah. Seperti dapat kita lihat pada tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah) di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019**

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	51.721,53	51.752,07	48.401,15	171.740,74	15.475,74	17.183,83
2011	57.343,60	60.716,29	55.758,55	198.289,08	17.406,53	20.189,34
2012	63.875,31	69.637,92	64.693,98	228.285,47	19.669,72	22.626,21
2013	71.097,46	79.842,22	71.041,25	258.836,42	22.129,28	25.249,49
2014	80.667,63	90.246,27	78.622,15	298.033,80	25.193,78	29.458,25
2015	91.145,68	107.573,47	87.714,48	340.390,21	28.493,42	32.987,55
2016	100.513,84	120.030,01	96.994,76	377.108,91	31.697,56	35.945,20
2017	110.116,73	133.951,16	107.423,45	415.588,20	34.537,68	39.497,41
2018	119.512,68	167.135,77	118.066,61	461.774,74	37.331,39	43.457,83
2019	139.181,53	185.740,09	129.226,35	504.321,74	41.143,56	46.358,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan tabel 1.3 maka dapat diketahui pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Tahun 2010 berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 171.740,74 sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah berada pada Provinsi Gorontalo dengan nilai 15.475,74. Kemudian dari tahun 2011 sampai dengan 2019 pertumbuhan ekonomi yang tertinggi masih tetap berada di Provinsi Sulawesi selatan dimana pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berhasil juga dengan melihat taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM inilah yang menentukan tinggi atau rendahnya produktivitas penduduk, semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk dan sebaliknya semakin rendah IPM maka semakin rendah juga produktivitas penduduk.

Pendapatan ekonomi yang tinggi hendaknya dapat berdampak pada pemerataan distribusi pendapatan. Namun hal ini bergantung pada bagaimana karakter dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Salah satunya adalah sektor-sektor ekonomi apa yang mendapat prioritas. Jika salah satu sektor ekonomi mendapat prioritas dalam pengembangannya, maka pertumbuhannya akan lebih cepat dari sektor ekonomi yang lain. Tentunya sektor yang mendapat prioritas adalah sektor yang memberikan kontribusi dan manfaat (peningkatan pendapatan) yang besar bagi sebagian masyarakat, bukan golongan kecil masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Diah Ratna Sari (2006) hanya pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Nurul Rahmawati (2013) dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi sektor pertanian berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi sektor jasa meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan teori Harrod-Domar (dalam Fauziah Siagian, 2019) yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan



ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka investasi dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Tingginya kegiatan investasi di daerah A dan rendahnya investasi di daerah B maka daerah A akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah B. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan investasi pada suatu daerah tanpa diikuti oleh peningkatan investasi di daerah lainnya, akan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Barro, 2000). Seperti dapat kita lihat pada tabel 1.4 berikut ini.

**Tabel 1.4 Realisasi Penanaman Modal (Investasi) Dalam (Milyar Rupiah) di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019**

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	322,6	292,1	33,2	3.654,1	17,5	877,3
2011	551,8	2.990,6	76,0	4.075,9	24,3	224,2
2012	725,2	1.409,3	941,0	2.901,5	200,2	228,8
2013	132,5	1.505,3	1.348,0	1.383,8	110,1	687,6
2014	181,4	1.590,0	1.411,7	5.230,5	49,2	706,4
2015	358,6	2.053,6	2.160,4	9.448,6	101,2	1.105,8
2016	5.452,4	3.401,5	2.170,3	3.707,1	2.215,2	104,7
2017	1.971,1	3.475,3	3.841,7	2.682,8	929,7	671,6
2018	4.616,0	9.161,3	2.276,3	3.893,1	2.707,6	3.168,9
2019	8.480,1	6.243,8	4.814,8	5.975,2	1.015,7	1.197,3

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel. 1.4 maka dapat diketahui penanaman modal (investasi) sepuluh tahun terakhir di Sulawesi. Investasi di Sulawesi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 mengalami ketidakstabilan (naik turun) atau fluktuatif. Dapat dilihat bahwa investasi yang ada di Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2015 paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi. Selain itu, Investasi terendah di Pulau Sulawesi pada tahun 2015 berada di Provinsi Gorontalo.

Kualitas sumber daya manusia dengan adanya tenaga kerja dalam setiap sektor berdampak pada ketimpangan pendapatan. Tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena tenaga kerja yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi. Dapat kita lihat pada tabel 1.5 berikut ini.

**Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja (Jiwa) di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019**

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	936.939	3.272.365	997.678	3.272.365	432.926	514.867
2011	990.720	3.375.498	1.026.548	3.375.498	445.210	536.048
2012	957.292	3.351.908	975.879	3.351.908	445.729	548.783
2013	965.457	3.376.549	968.949	3.291.280	449.104	523.960
2014	980.756	3.527.036	1.037.419	3.527.036	479.137	595.797
2015	965.457	3.485.492	1.074.916	3.485.492	493.687	595.905
2016	1.110.564	3.694.712	1.219.548	3.694.712	546.668	624.182
2017	1.040.826	3.598.663	1.160.974	3.398.663	524.316	595.004
2018	1.095.145	3.774.924	1.207.488	3.774.924	555.533	619.395
2019	1.131.521	3.830.096	1.217.983	3.830.096	562.087	641.613

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel. 1.5 maka dapat diketahui jumlah tenaga kerja sepuluh tahun terakhir di Sulawesi. Jumlah tenaga kerja di Sulawesi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 mengalami ketidakstabilan (naik turun) atau fluktuatif. Dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi. Selain itu, jumlah tenaga kerja di Pulau Sulawesi pada tahun 2019 berada di Provinsi Gorontalo.

Jadi dalam pembangunan masalah tenaga kerja dan sumber daya manusia (*human resources*) perlu mendapat perhatian yang serius daripada pemerintah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada daerah A yang tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah B akan menyebabkan tingginya produksi pada daerah A sedangkan daerah B tidak. Oleh sebab itu, kegiatan produksi di daerah A akan semakin tinggi sedangkan di daerah B akan semakin lambat. Jika dibiarkan hal ini akan memperlebar ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan produktivitas tenaga kerja akan menurunkan ketimpangan pendapatan (Ebel dan Yilmaz, 2002).

Tingginya tingkat Pendidikan serta banyaknya masyarakat yang berpendidikan atau bersekolah dapat mempengaruhi kesenjangan pendapatan dimana angka rata-rata lama sekolah terhitung tinggi. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dapat kita lihat pada tabel 1.6 berikut ini.

**Tabel 1.6 Persentase Rata-Rata Lama Sekolah di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019**

Tahun	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Gorontalo	Sulawesi Barat
2010	8,66	7,65	7,57	7,29	6,85	6,63
2011	8,68	7,69	7,67	7,33	6,89	6,65
2012	8,71	7,73	7,76	7,37	6,92	6,76
2013	8,79	7,82	7,93	7,45	6,96	6,87
2014	8,86	7,89	8,02	7,49	6,97	6,88
2015	8,88	7,97	8,18	7,64	7,05	6,94
2016	8,96	8,12	8,32	7,75	7,12	7,14
2017	9,14	8,29	8,46	7,95	7,28	7,31
2018	9,24	8,52	8,69	8,02	7,46	7,50
2019	9,43	8,75	8,91	8,26	7,69	7,73

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019*

Berdasarkan Tabel. 1.6 maka dapat diketahui jumlah tenaga kerja sepuluh tahun terakhir di Sulawesi. Tingkat pendidikan di Sulawesi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 mengalami ketidakstabilan (naik turun) atau fluktuatif. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi. Selain itu, Tingkat pendidikan di Pulau Sulawesi pada tahun 2017 berada di Provinsi Gorontalo.

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2016).

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah di Pulau Sulawesi, pemahaman pertama yang perlu ditelaah adalah mengenai kondisi kesenjangan pendapatan antar wilayah di Pulau Sulawesi apakah semakin melebar atau berkurang, serta kesenjangan yang terjadi masih dalam taraf rendah, sedang, atau tinggi. Adanya kesenjangan pendapatan antar wilayah berarti terdapat beberapa daerah yang cepat tumbuh, namun terdapat daerah lain yang tertinggal karena mengalami pertumbuhan ekonomi lambat.

Dilihat dari kesenjangan pendapatan di Sulawesi, penulis ingin melakukan analisis penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Investasi, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Sulawesi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat ternyata ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan, jumlah dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, namun ketimpangan antara “si kaya” dan “si miskin” cenderung semakin lebar saat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.
2. Sepuluh tahun terakhir indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Sulawesi yaitu indeks gini. Dapat dilihat bahwa ketimpangan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi

lainnya yang ada di Pulau Sulawesi, mengingat angka indeks gini yaitu 0 sampai 1 yang mana 0 menunjukkan pemerataan dan 1 menunjukkan ketimpangan. Indeks gini se Sulawesi menunjukkan angka yang tinggi selain itu, ketimpangan terbesar di Pulau Sulawesi berada di Provinsi Gorontalo.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh struktur ekonomi, investasi PMA, investasi PMDN, tenaga kerja dan tingkat pendidikan (RLS) terhadap kesenjangan pendapatan di Sulawesi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Mengetahui pengaruh struktur ekonomi, investasi PMA, investasi PMDN, tenaga kerja dan tingkat pendidikan (RLS) terhadap kesenjangan pendapatan di Sulawesi.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan tentang kesenjangan pendapatan, khususnya di lihat pada struktur ekonomi, investasi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan.

### **2. Secara Praktis**

Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan di Pulau Sulawesi tersebut di lihat dari pertumbuhan ekonomi dan faktor kemiskinannya.

Peneliti lain, yaitu hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangannya. Oleh sebab itu, terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutan di masa mendatang.